

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara fungsional, pendidikan pada dasarnya ditujukan untuk menyiapkan manusia menghadapi masa depan agar hidup lebih sejahtera, baik sebagai individu maupun secara kolektif sebagai warga masyarakat, bangsa maupun antar bangsa. Bagi pemeluk agama, masa depan mencakup kehidupan di dunia dan pandangan tentang kehidupan hari kemudian yang bahagia.¹

Pendidikan merupakan salah satu sarana penting dalam keseharian hidup manusia di dunia. Tak ada satu halpun yang dilakukan oleh manusia yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Bahkan sadar atau tidak kita selalu mengalami proses pendidikan setiap harinya. Sejak kecil hingga dewasa manusia selalu melakukan proses pendidikan baik secara informal maupun formal. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan manusia dalam pembangunan *human capital* yang merupakan pendorong utama sumber daya manusia dalam mencapai tujuan hidupnya, sehingga pendidikan merupakan bagian penting dari proses pembangunan nasional yang ikut menentukan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pendidikan juga merupakan investasi dalam pembangunan sumber daya manusia, dimana peningkatan kecakapan dan kemampuan diyakini sebagai faktor pendukung upaya manusia dalam mengarungi kehidupan yang penuh dengan ketidak pastian.

¹Umaedi, *Manajemen Mutu Berbasis Sekolah/Madrasah*, (Jakarta: CEQM, 2004), h.1

Dewasa ini banyak upaya peningkatan mutu pendidikan terus dilakukan oleh berbagai pihak. Upaya-upaya tersebut dilandasi suatu kesadaran betapa pentingnya peranan pendidikan dalam pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan watak bangsa untuk kemajuan masyarakat dan bangsa. Harkat dan martabat suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas pendidikannya.

Dalam konteks bangsa Indonesia, peningkatan mutu pendidikan merupakan sasaran pembangunan di bidang pendidikan nasional dan merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia secara menyeluruh.²

Tinggi rendahnya derajat seseorang tergantung pada tingkat pendidikannya, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al Mujaadalah ayat 11:³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَاَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.

Begitu pentingnya pendidikan dalam kehidupan seseorang, keluarga, bangsa, dan negara, maka pemerintah menuangkan fungsi serta menetapkan suatu tujuan pendidikan nasional yang dicantumkan dalam Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II, dasar, fungsi, dan tujuan, pasal 3 yang berbunyi :

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka

²E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional dalam Menyukkseskan MBS dan KBK* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h. 31

³Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1992), h. 910-911

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.⁴

Sesuai dengan tujuan tersebut, maka setiap arah dan tujuan pendidikan di Indonesia diupayakan untuk membentuk pribadi yang tidak hanya cerdas dalam intelektual, tapi juga memiliki kepribadian yang mulia serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu pendidikan harus mempunyai mutu yang tinggi. Dewasa ini tekanan yang menuntut pertanggungjawaban mengenai relevansi dan mutu hasil pendidikan semakin besar. Ketidak pastian mengenai lowonagn kerja, kelangkaan sumber-sumber dan perlunya meneliti dengan cermat lembaga yang menerima pembiayaan juga menuntut untuk memberikan ivestasi dalam pengembangan sumber daya manusia, dimana peningkatan kecakapan dan kemampuan diyakini sebagai faktor pendukung upaya manusia dalam mengarungi kehidupan yang penuh ketidak pastian. Dalam rangka inilah pendidikan diperlukan dan dipandang sebagai kebutuhan dasar bagi masyarakat yang ingin maju, demikian halnya bagi masyarakat Indonesia yang memiliki wilayah amat luas.

Pendidikan bukanlah suatu upaya sederhana, melainkan suatu kegiatan yang dinamis dan penuh tantangan. Pendidikan akan selalu berubah seiring dengan perubahan jaman. Setiap saat pendidikan selalu menjadi fokus perhatian dan bahkan tak jarang menjadi sasaran ketidak puasannya karena pendidikan menyangkut kepentingan semua orang. Pendidikan tidak hanya menyangkut

⁴Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Penjabarannya*, (Bandung: Citra Umbara 2003), h. 7

investasi dan kondisi kehidupan dimasa yang akan datang, melainkan juga menyangkut kondisi dan suasana kehidupan saat ini. Itulah sebabnya pendidikan senantiasa memerlukan upaya perbaikan dan peningkatan sejalan dengan semakin tingginya kebutuhan dan tuntunan kehidupan masyarakat. Upaya perbaikan tersebut dimaksudkan untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Ar-Ra'ad ayat 11:⁵

... إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Dari ayat tersebut di atas dapat dipahami, bahwa manusia dituntut untuk selalu berusaha melakukan perubahan kearah yang lebih baik, begitu juga dengan bidang pendidikan kita sekarang ini harus mempunyai inovasi baru dan mutu yang lebih baik dari masa kemasa, dari satu kebijakan ke kebijakan yang lain, dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan dari satu pengembangan lainnya, seharusnya memang ada perubahan. Bahkan, perubahan untuk meningkatkan mutu itu harus diprogramkan supaya dapat dikelola dengan baik.

Mutu pendidikan Indonesia dalam berbagai pandangan lapisan masyarakat hingga sekarang ini disimpulkan dalam kategori rendah pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, misalnya pengembangan kurikulum, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, pengadaan buku-buku, alat-alat pelajaran, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. Namun indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Sebagian sekolah, terutama di kota-kota, menunjukkan

⁵ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 370

peningkatan mutu pendidikan yang cukup menggembirakan, namun sebagian besar lainnya masih tertinggal.

Menurut Depdiknas ada tiga faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan, yaitu:⁶

Faktor pertama, kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan *education function* atau *input-output* analisis yang tidak dilaksanakan secara konsekuen. Pendekatan ini melihat bahwa lembaga pendidikan berfungsi sebagai pusat produksi yang apabila dipenuhi semua *input* yang diperlukan dalam kegiatan produksi tersebut, maka lembaga ini akan menghasilkan *output* yang dikehendaki. Pendekatan ini menganggap bahwa apabila *input* seperti pelatihan guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, dan perbaikan sarana serta prasarana pendidikan lainnya, dipenuhi, maka mutu pendidikan secara otomatis akan terjadi. Dalam kenyataan mutu pendidikan yang diharapkan tidak terjadi. Mengapa? Karena selama ini dalam menerapkan pendekatan *educational production function* terlalu memusatkan pada *input* pendidikan dan kurang memperhatikan pada proses pendidikan. Padahal, proses pendidikan sangat menentukan *output* pendidikan.

Faktor kedua, penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara birokratik-sentralistik sehingga menempatkan sekolah sebagai penyelenggaraan pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi yang mempunyai jalur yang sangat panjang dan kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat. Sekolah lebih merupakan subordinasi birokrasi

⁶Depdiknas, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*, Edisi 3, (Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Umum dan Direktorat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, t.th) h. 3-4

diatasnya sehingga mereka kehilangan kemandirian, keluwesan, motivasi, kreativitas/inisiatif untuk mengembangkan dan memajukan lembaganya termasuk peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu tujuan pendidikan nasional.

Faktor ketiga, peranserta warga sekolah khususnya guru dan peranserta masyarakat khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini sangat minim. Partisipasi guru dalam pengambilan keputusan sering diabaikan, pada hal terjadi atau tidaknya perubahan di sekolah sangat tergantung pada guru. Dikenalkan pembaruan apapun jika guru tidak berubah, maka tidak akan terjadi perubahan di sekolah tersebut. Partisipasi masyarakat selama ini pada umumnya sebatas pada dukungan dana, sedang dukungan-dukkungan lain seperti pemikiran, moral dan barag/jasa kurang diperhatikan. Akuntabilitas sekolah terhadap masyarakat juga lemah. Sekolah tidak mempunyai beban untuk mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan pendidikan kepada masyarakat, khususnya orang tua siswa, sebagai salah satu unsur utama yang berkepentingan dengan pendidikan (*stake holder*).

Dari pemaparan ketiga faktor diatas yang penyebab rendahnya mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata perlu dilakukan upaya reorientasi pendidikan yang dapat meningkatkan partisipasi warga sekolah dan masarakat, pelaksanaan pendidikan harus lebih memperhatikan proses serta desentralisasi sistem pendidikan.

Timbulnya persepsi bahwa penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah sehingga tidak mengherankan apabila partisipasi masyarakat selama ini pada umumnya lebih banyak bersifat kewajiban

untuk mendukung input pendidikan tertentu (dana), bukan proses pendidikan (pengambilan keputusan, monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas).

Kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bervariasi serta munculnya berbagai macam masalah mendorong pemerintah memperhatikan potensi daerah. Standarisasi pada penyeragaman rencana yang terlalu terpusat menghambat pelaksanaan pembangunan karena cenderung akan berakibat pada ketidaksesuaian antara rencana pusat dan kebutuhan daerah masing-masing

Meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia selama ini kurang memuaskan banyak pihak, maka perlu adanya upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Upaya peningkatan kualitas pendidikan dapat dilakukan dengan melakukan reformasi pendidikan. Model reformasi yang ditawarkan akhir-akhir ini untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah model Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS). Secara umum, MPMBS dapat diartikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas atau keluwesan besar kepada sekolah dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu sekolah berdasar kebijakan-kebijakan nasional serta peraturan perundangan yang berlaku, MPMBS merupakan bagian dari manajemen berbasis sekolah. Jika MBS bertujuan untuk meningkatkan kinerja sekolah (efektivitas, kualitas, efisiensi, inovasi, relevansi dan pemerataan serta akses pendidikan) maka MPMBS lebih difokuskan pada peningkatan mutu. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa mutu pendidikan kita saat ini sangat memprihatinkan sehingga memerlukan perhatian yang lebih serius.

MPMBS merupakan suatu kajian yang banyak dibahas untuk mengubah sistem pendidikan yang sentralistik ke arah desentralistik. Desentralisasi pendidikan memberi wewenang kepada sekolah dan masyarakat setempat untuk mengelola pendidikan. Dengan demikian dapat diharapkan tercapai peningkatan kerjasama antara sekolah, guru, pegawai lainnya dan masyarakat serta peningkatan kualitas dan produktivitas pendidikan. Hal tersebut juga akan membentuk kemandirian sekolah yang selama ini kurang ditekankan, sehingga fungsi-fungsi yang ada akan di desentralisasikan disekolah.

Seiring dengan reformasi pendidikan yang diilhami oleh Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, pendidikan merupakan salahsatu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kebijakan ini memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk memberdayakan pendidikan berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat. Pemerintah daerah diharapkan senantiasa meningkatkan kemampuannya dalam berbagai tahap pembangunan pendidikan, sejak tahap perumusan kebijakan daerah, perencanaan, pelaksanaan, sampai pemantau di daerah masing-masing, seiring denga itu pula pemerintah berupaya memberlakukan manajemen peningkatan mutu berbasis berbasis sekolah di semua jenjang pendidikan baik negeri maupun swasta, namun MPMBS adalah upaya serius yang rumit, yang memunculkan berbagai isu kebijakan dan melibatkan banyak lini kewenangan dalam pengambilan keputusan serta tanggung jawab dan akuntabilitas atas konsekuensi keputusan yang diambil semua pihak yang terlibat perlu memahami benar pengertian MPMBS, manfaat, masalah-masalah dalam

penerapannya, dan yang terpenting adalah pengaruhnya terhadap prestasi belajar murid. Dipilihnya MPMBS sebagai model desentralisasi pendidikan karena diyakini model ini akan mempermudah pencapaian tujuan pendidikan. Sementara itu MPMBS ini masih relatif baru dalam manajemen pendidikan Indonesia dan merupakan adopsi dari negara lain. Sebagai ide baru, tentu saja konsep MPMBS ini tidak secara otomatis sempurna untuk itu penulis merasa perlu untuk meneliti lebih jauh mengenai penerapan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) ini.

SMP Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin adalah merupakan salahsatu lembaga pendidikan swasta unggulan yang ada di Banjarmasin memiliki keistimewaan dibanding dengan SMP lainnya salahsatunya mempunyai jaminan kualitas terhadap peserta didik serta menerapkan sistem *Integrated Islamic full Day School* dalam pembelajaran. Sebagai sekolah unggulan pasti ditunjang dengan penerapan manajemen pendidikan yang baik pula, oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkatnya dalam sebuah karya ilmiah skripsi tentang hal tersebut dengan judul PENERAPAN MANAJEMEN PENINGKATAN MUTU BERSBASIS SEKOLAH (MPMBS) PADA SMP ISLAM TERPADU UKHUWAH BANJARMASIN.

B. Definisi Operasional dan Lingkup Pembahasan

Untuk memperjelas judul penelitian ini, penulis perlu memberikan definisi secara operasional agar tidak terjadi salah pengertian serta meluasnya pembahasan, penulis akan membatasi permasalahan sesuai dengan definisi-definisi berikut:

1. Penerapan

Penerapan berasal dari kata "terap" yang berarti mengenakan sesuatu, cara pemakaian sesuatu.⁷ Jadi yang dimaksud di sini adalah perbuatan atau menerapkan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah.

2. Manajemen Pendidikan

Secara umum manajemen adalah mengatur atau mengelola, sedangkan menurut istilah para ahli di antaranya, bahwa "manajemen adalah kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran dan tujuan pokok yang telah ditentukan dengan menggunakan orang-orang pelaksananya".⁸ Manajemen pendidikan mengandung pengertian proses untuk mencapai tujuan pendidikan. Proses itu dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemantauan dan penilaian.⁹

3. Mutu Pendidikan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mutu adalah berkaitan dengan baik buruk suatu benda; kadar; atau derajat misalnya kepandaian, kecerdasan dan sebagainya.¹⁰ Secara umum, mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses, dan output pendidikan.¹¹

⁷Daryanto SS, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Apollo, 1998), h. 186

⁸Ngalim Purwanto, *Administrasi Pendidikan*, (Jakarta: Mutiara, 1981), h. 18

⁹B. Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan di Sekolah*, (Jakarta: PT. Renika Cipta, 2004), h. 16

¹⁰Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), cet.10, h. 677

¹¹Depdiknas, *op. cit*, h 24.

4. Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS)

MPMBS adalah model desentralisasi pendidikan, khususnya untuk pendidikan dasar dan menengah yang diyakini sebagai model yang akan mempermudah pencapaian tujuan pendidikan. Dalam konteks penyelenggaraan persekolahan saat ini MPMBS dijadikan sebagai suatu kebijakan untuk meningkatkan mutu pendidikan.¹² Dalam penerapannya memberikan fleksibilitas atau keluwesan besar kepada sekolah dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu sekolah berdasar kebijakan-kebijakan nasional serta peraturan perundangan yang berlaku.

MPMBS merupakan bagian dari manajemen berbasis sekolah. Jika MBS bertujuan untuk meningkatkan kinerja sekolah (efektivitas, kualitas, efisiensi, inovasi, relevansi dan pemerataan serta akses pendidikan) maka MPMBS lebih difokuskan pada peningkatan mutu, target utama MPMBS di Indonesia adalah pemberdayaan sekolah untuk secara mandiri dapat meningkatkan mutu pendidikan.

5. SMP Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin

SMP Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin adalah merupakan sebuah lembaga pendidikan swasta setingkat SLTP yang ada di Banjarmasin, dalam sistem pembelajarannya menggunakan konsep terpadu antara pelajaran agama Islam dan pelajaran umum serta menerapkan sistem Islamic Fullday School. Sekolah ini juga memiliki jaminan kualitas (quality assurance) untuk peserta didik dari segi akhlak, prestasi dan kemandirian.

¹²Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 305

Jadi yang dimaksud dengan judul diatas adalah melakukan penelitian yang bersangkutan dengan Penerapan MPMBS di SMP Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin melalui karakteristik MPMBS, serta meneliti faktor-faktor yang mempengaruhinya.

C. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Penerapan MPMBS pada SMP Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan MPMBS pada SMP Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin?

D. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa hal yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian judul diatas adalah sebagai berikut:

1. Mutu pendidikan merupakan hal yang krusial, dan selalu relevan untuk dikaji dalam rangka turut berperan serta untuk menyiapkan lulusan yang bermutu.
2. Konsep MPMBS ini merupakan ide baru dalam wacana manajemen pendidikan di Indonesia. Sebagai ide baru, tentu saja konsep MPMBS ini tidak secara otomatis sempurna.
3. SMP Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin merupakan lembaga pendidikan tingkat SLTP yang dalam sistem pembelajarannya menggunakan konsep

terpadu antara pelajaran agama Islam dan pelajaran umum serta menerapkan sistem *Islamic Fullday School*. Sekolah ini juga memiliki jaminan kualitas (*quality assurance*) dan merupakan sekolah unggulan di Banjarmasin sehingga representatif untuk diteliti khususnya tentang Penerapan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah.

E. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan MPMBS pada SMP Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan MPMBS pada SMP Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin.

F. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian di harapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah khususnya pada SMP Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin dan pada umumnya semua institusi pendidikan di Indonesia baik yang bersifat teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan menambah bahan kajian khususnya mengenai penerapan MPMBS pada SLTP serta seluruh institusi pendidikan pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi sekolah memberikan informasi tentang konteks, *input*, proses, *output* sekolah yang mendukung penerapan MPMBS.
- b. Bagi masyarakat memberikan deskripsi mengenai apa dan bagaimana penerapan MPMBS sehingga dapat mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat terhadap pendidikan.
- c. Bagi Sekolah setingkat SLTP menjadi bahan pertimbangan untuk menerapkan MPMBS
- d. Sebagai pertimbangan dalam mengambil kebijakan monitoring evaluasi dalam penerapan MPMBS.
- e. Sebagai bahan masukan dan tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan rekan-rekan serta menambah khazanah perpustakaan Fakultas Tarbiyah dan perpustakaan pusat IAIN Antasari Banjarmasin.
- f. Menjadi bahan informasi bagi peneliti yang akan meneliti permasalahan yang serupa.

G. Kerangka Pemikiran

Manajemen pendidikan adalah kunci keberhasilan untuk mencapai kesuksesan dalam mengelola sebuah sekolah. Dengan manajemen yang baik, sekolah akan berhasil memenuhi tuntutan mutu pendidikan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan. Manajemen yang baik juga akan menghasilkan lulusan yang baik.

Penerapan MPMBS dapat dilihat pula melalui sistem pendidikan. Hal ini didasari oleh pengertian bahwa sekolah merupakan sebuah sistem sehingga

penguraian karakteristik MPMBS berdasarkan berdasarkan pada *input*, proses dan *output*.¹³

Dalam *input* pendidikan ini meliputi; 1) Memiliki kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu yang jelas, 2) Sumber daya yang tersedia dan siap, 3) Staf yang kompeten dan berdedikasi tinggi, 4) Memiliki harapan prestasi yang tinggi, 5) fokus pada pelanggan dan 6) Input manajemen.

Dalam proses terdapat sejumlah karakter yaitu; 1) PBM yang memiliki tingkat efektifitas yang tinggi, 2) Kepemimpinan sekolah yang kuat, 3) Lingkungan sekolah yang aman dan tertib, 4) Pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif, 5) Sekolah memiliki budaya mutu, 6) Sekolah memiliki *team work* yang kompak, cerdas, dan dinamis.

Dalam *output* pendidikan adalah prestasi sekolah yang dihasilkan oleh proses pembelajaran dan manajemen di sekolah. Pada umumnya *output* dapat dikategorikan menjadi dua yaitu *output* berupa prestasi akademik dan *output* berupa prestasi non akademik. *Output* prestasi akademik misalnya, NEM, lomba karya ilmiah remaja, lomba (Bahasa Inggris, Matematika, dan Fisika), cara-cara berfikir (kritis, kreatif/divergen, nalar, rasional, induktif, deduktif dan ilmiah). *Output* non akademik, misalnya keingintahuan yang tinggi, harga diri, kejujuran, kerja sama, solidaritas yang tinggi, toleransi, kedisiplinan, kerajinan, prestasi olahraga, kesenian, dan kepramukaan.

¹³Depdiknas, *MPMBS, Konsep & Pelaksanaan* (Jakarta: Depdiknas Dirjen Diknasmen direktorat SLTP, 2001), h.9

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, definisi oprasional, alasan memilih judul, tujuan penelitian, signifikansi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II adalah Tinjauan Teoritis tentang pengertian manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah, tujuan dan alasan diterapkannya manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah, prinsip-prinsip dan kerangka kerja manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah, karakteristik manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah.

BAB III adalah Metode Penelitian terdiri dari subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan pengelolaan data, analisis dan prosedur penelitian.

BAB IV adalah Laporan Hasil Penelitian terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, penyajian dan analisis data

BAB V adalah Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.